

REVIEW SEBUAH WEBSITE WWW.KPU.GO.ID

Armadyah Amborowati
Dosen STMIK AMIKOM Yogyakarta

Abstraksi

KPU merupakan lembaga independen yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang bersih, transparan, akuntabel, dan mendukung terciptanya demokrasi di Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tulisan ini mengevaluasi website KPU yang menggunakan HOT fit model yang menekankan pada kualitas informasi, yaitu akurat, relevan, dan tepat waktu. Hasil analisis disimpulkan bahwa website KPU belum mendukung sepenuhnya tugas dari KPU.

Kata kunci: *KPU, Pemilihan umum, HOT (human-Organization-Technology) fit Model, kualitas informasi*

Pendahuluan

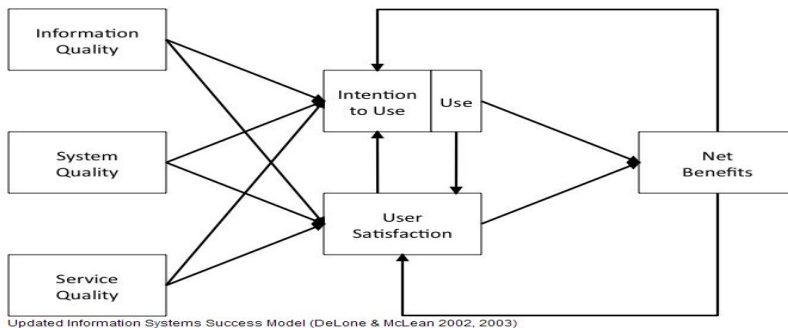
KPU (komisi pemilihan umum) adalah sebuah lembaga yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pemilihan umum (pusat dan daerah) yang bersih, transparan, akuntabel, dan mendukung terciptanya demokrasi di Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemilihan umum di Indonesia ada 3 macam, yaitu pemilihan kepala negara/Presiden, pemilihan kepala daerah (tingkat II dan tingkat I), dan pemilihan dewan legislatif (tingkat II, tingkat I, pusat). Berdasarkan tugas dari KPU maka informasi yang disediakan oleh KPU untuk masyarakat harus mendukung tugas tersebut.

Menurut Yusuf, 2006, salah satu metode yang digunakan untuk mengevaluasi sistem informasi adalah HOT (Human-Organization-Technology) fit Model [Eris L., 2006]. Model ini menempatkan komponen penting dalam sistem informasi yaitu Manusia (Human), Organisasi (Organization), Teknologi (Technology), dan kesesuaian hubungan diantaranya.

Penelitian ini mengaju pada salah satu komponen didalam HOT fit Model yaitu komponen teknologi yang difokuskan pada kualitas informasi. Dalam komponen teknologi terdiri dari kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan.

Kualitas informasi difokuskan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi www.kpu.go.id. Adapun kriteria yang digunakan dalam kualitas informasi adalah:

- Relevan
 - Informasi tersebut mempunyai manfaat bagi pemakainya.
- Akurat
 - Informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak bias.
- Tepat waktu
 - Informasi yang dibutuhkan penerima tidak boleh terlambat.



Sumber :

http://www.fsc.yorku.ca/york/istheory/wiki/index.php/Delone_and_McLean_IS_success_model

Gambar 1 Model Kesuksesan sistem informasi

Pembahasan

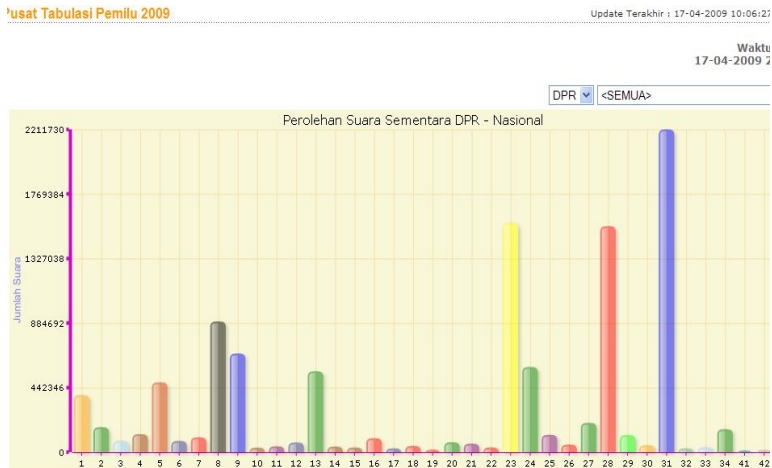
Analisis terhadap website www.kpu.go.id berpedoman pada kualitas informasi yaitu akurat, relevan, dan tepat waktu. Hasil analisis terhadap website KPU yaitu www.kpu.go.id banyak ditemukan informasi-informasi yang harusnya tersampaikan menjadi tidak tersampaikan. Misalnya: capture terhadap halaman home.



Gambar 2. Halaman Home

Informasi yang disediakan antara lain:

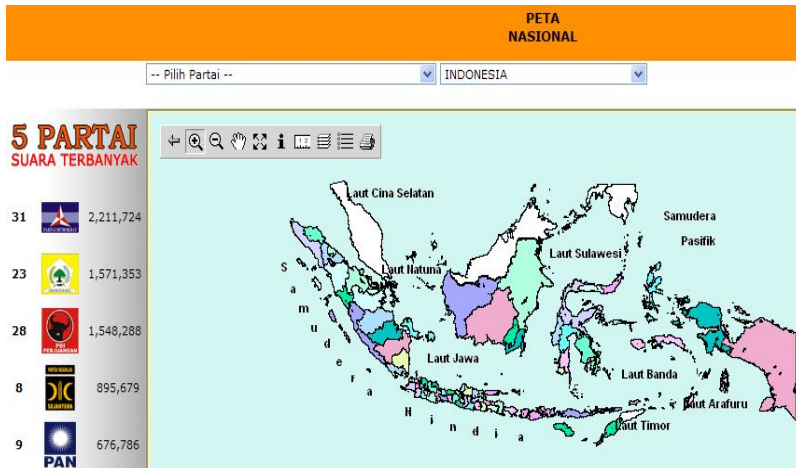
- Berita mengenai KPU
- Tabulasi Nasional Pemilu 2008/2009, jika dilihat informasinya cukup akurat, relevan bagi masyarakat, dan tepat waktu karena srtiap ada perubahan terus teraupdate.



Gambar 3 capture tab tabulasi nasional hasil pemilu 2008/2009

- WebGIS Pemilu 2008/2009

Informasi yang disajikan mengenai penyebaran partai dengan suara terbanyak. Berdasarkan peta penyebaran memberikan informasi kepada partai-partai yang berkepentingan. Contohnya daerah mana saja yang memberi dukungan yang banyak.



Gambar 4 capture halaman penyebaran partai dengan suara terbanyak

- Undang-undang/ Peraturan

Categories		Files
	Undang-undang	5
	Peraturan Pemerintah	1
	Keputusan Presiden	2
	Peraturan Komisi Pemilihan Umum	61
	Surat / Edaran / Juknis / Lain-lain	18
	Keputusan Menteri Dalam Negeri	0

Gambar 5. Capture halaman undang-undang/ Peraturan yang di publish

Dari informasi yang disajikan ada beberapa informasi penting yang belum disajikan untuk kepentingan masyarakat dan partai politik. Misalnya:

- Data mengenai partai yang berisi:
 - Nama partai Politik
 - Ketua partai
 - Visi dan misi
- Nama-nama calon anggota legislatif yang mengikuti pemilihan umum. Hal ini sangat penting karena banyak masyarakat yang tidak kenal dengan calon anggota legislatif yang akan dicontreng. Selain nama informasi lain, contohnya:
 - Visi dan misinya
 - Pendidikannya yang merupakan syarat untuk menjadi caleg.
 - Jumlah saldo rekening yang dimiliki karena merupakan syarat untuk menjadi caleg.

Pendidikan dan jumlah rekening digunakan untuk menyaring apakah baleg tersebut lolos seleksi.

- Nama calon kepala daerah atau pusat yang mengikuti pemilihan umum beserta visi dan misinya.
- Nama calon presiden dan wakil presiden yang mengikuti pemilihan umum beserta visi dan misinya.
- Nama daerah tempat pemilihan.
- Nama pemilih agar datanya bisa diintegrasikan dengan pusat kependudukan. Hal ini diperlukan untuk menghindari adanya masyarakat yang tidak terdata, atau terdata lebih dari satu kali. Selain itu informasi ini bisa diakses oleh masyarakat agar masyarakat juga mengontrol data pemilih.
- Informasi tahun pemilihan umum karena sistem ini bisa dipakai kapan saja setiap ada pemilihan umum (pemilihan umum calon anggota legislatif, pemilihan umum untuk memilih kepala daerah, dan pemilihan umum untuk memilih Presiden dan wakil Presiden).

Dari keterangan diatas maka diusulkan suatu pengembangan sistem yang mendukung informasi yang belum disajikan agar bisa diimplementasikan. Dari gambar 5 bisa dilihat tabel-tabel yang saling

The diagram illustrates the database structure for Pilkada 2020, featuring the following tables and their attributes:

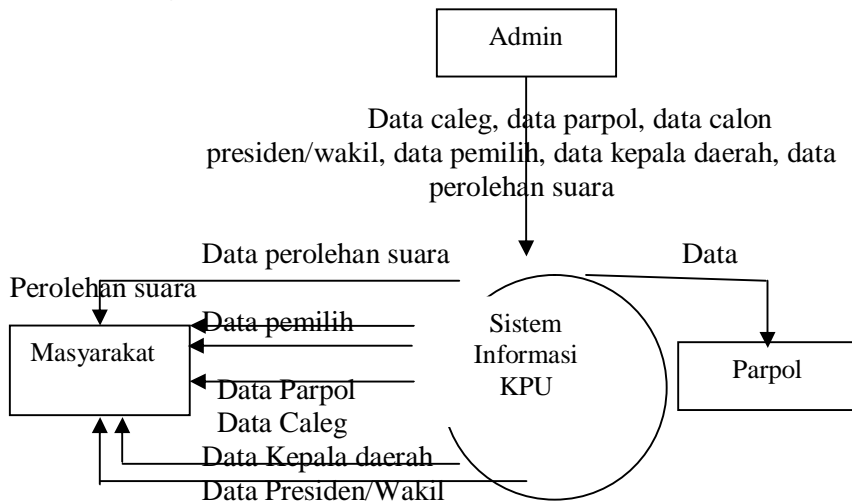
- partai**: idpartai, nama_partai, visi, misi, ketua
- calon_legislatif**: idcalon_legislatif, partai_idpartai (FK)
- calon_legislatif_has_daftar_pemilihan**: calon_legislatif_idcalon_legislatif (FK), calon_legislatif_idcalon_legislatif (FK)
- daftar_pemilihan**: iddaftar_pemilihan
- pemilih_has_calon_legislatif**: pemilih_idpemilih (FK), calon_legislatif_partai_idpartai (FK)
- pemilih**: idpemilih, desa_iddesa (FK)
- desa**: iddesa, kecamatan_idkecamatan (FK)
- kecamatan**: idkecamatan, kabupaten-kodya_idkabupaten-kodya (FK)
- kabupaten-kodya**: idkabupaten-kodya, propinsi_idpropinsi (FK)
- propinsi**: idpropinsi, nama_prop
- kabupaten-kodya_has_calon_kepala_daerah**: kabupaten-kodya_propinsi_idpropinsi (FK), kabupaten-kodya_idkabupaten-kodya (FK)
- propinsi_has_calon_kepala_daerah**: propinsi_idpropinsi (FK), calon_kepala_daerah_idcalon_kepala_daerah (FK)
- calon_kepala_daerah**: idcalon_kepala_daerah
- pemilih_has_presiden**: pemilih_desa_kecamatan_kabupaten-kodya_propinsi_idpropinsi (FK), pemilih_desa_kecamatan_kabupaten-kodya_idkabupaten-kodya (FK)
- pemilih_has_calon_kepala_daerah**: pemilih_desa_kecamatan_kabupaten-kodya_propinsi_idpropinsi (FK), pemilih_desa_kecamatan_kabupaten-kodya_idkabupaten-kodya (FK)

Relationships are indicated by lines with crow's foot notation:

- Rel_01**: partai (1) to calon_legislatif (N), mandatory one-to-many.
- Rel_02**: calon_legislatif (1) to calon_legislatif_has_daftar_pemilihan (N), mandatory one-to-many.
- Rel_03**: calon_legislatif (1) to pemilih_has_calon_legislatif (N), mandatory one-to-many.
- Rel_04**: calon_legislatif_has_daftar_pemilihan (1) to daftar_pemilihan (N), mandatory one-to-many.
- Rel_05**: pemilih_has_calon_legislatif (1) to pemilih (N), mandatory one-to-many.
- Rel_06**: pemilih (1) to desa (N), mandatory one-to-many.
- Rel_07**: desa (1) to kecamatan (N), mandatory one-to-many.
- Rel_08**: kecamatan (1) to kabupaten-kodya (N), mandatory one-to-many.
- Rel_09**: kabupaten-kodya (1) to propinsi (N), mandatory one-to-many.
- Rel_10**: propinsi (1) to propinsi_has_calon_kepala_daerah (N), mandatory one-to-many.
- Rel_11**: propinsi_has_calon_kepala_daerah (1) to calon_kepala_daerah (N), mandatory one-to-many.
- Rel_12**: kabupaten-kodya (1) to kabupaten-kodya_has_calon_kepala_daerah (N), mandatory one-to-many.
- Rel_13**: kabupaten-kodya_has_calon_kepala_daerah (1) to pemilih_has_calon_kepala_daerah (N), mandatory one-to-many.
- Rel_14**: pemilih_has_calon_kepala_daerah (1) to pemilih_has_presiden (N), mandatory one-to-many.
- Rel_15**: pemilih_has_presiden (1) to pemilih (N), mandatory one-to-many.

Gambar 6 Hubungan antar tabel untuk sistem yang diusulkan

Konteks Diagram



Gambar 7 Konteks Diagram sistem yang diusulkan

Penutup

Dari analisis terhadap website www.kpu.go.id dapat disimpulkan bahwa:

- Informasi yang mengenai tabulasi hasil pemilu dan penyebaran partai dengan suara terbanyak sudah memenuhi kualitas dari informasi, yaitu sudah informasinya sudah akurat, relevan bagi yang membutuhkan, dan tepat waktu.
- Ada beberapa informasi yang tidak disajikan untuk mendukung tugas dari KPU, yaitu informasi yang dibutuhkan untuk masyarakat. Misalkan:
 - Data mengenai partai
 - Data mengenai pemilih
 - Data mengenai calon anggota legislatif
 - Data mengenai calon Presiden dan Wakil Presiden

Daftar Pustaka

- Eris L., 2006, Model Evaluasi Sistem Informasi Sumber Online
<http://simkesugm06.wordpress.com/2006/10/03/model-evaluasi-sistem-informasi/> akses tgl 10 April 2009 Pukul 14.00 WIB
- http://www.fsc.yorku.ca/york/istheory/wiki/index.php/Delone_and_McLean_IS_success_model
- Schou, 2007, Information Assurance for the Enterprise, McGraw Hill, New York.
- UU no.22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum.
Sumberonline.,http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_docman&Itemid=78 akses tgl 14 April 2009 pukul 09.40 WIB.
- UU no.2 tahun 2008 tentang partai politik.
Sumber.,http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=23&Itemid=78 akses tgl 14 April 2009 pukul 09.50 WIB.
- UU no.10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Sumber.,http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=23&Itemid=78 akses tgl 14 April 2009 Pukul 10.20 WIB
- UU no.12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.
Sumber.,http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=23&Itemid=78 akses tgl 14 April 2009 Pukul 10.45 WIB.
- UU no.42 tahun 2008 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
Sumber.http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=23&Itemid=78 akses tgl 14 April 2009 pukul 10.16 WIB.
- www.kpu.go.id tanggal akses 17 April 2009 Pukul 10.06 WIB.